

## **BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **A. Simpulan**

1. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019 – 2024. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan finansial akibat tingkat pendapatan rendah, yang akan membatasi akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya yang berkualitas, sehingga masyarakat akan cenderung memilih alternatif lainnya yang justru memiliki gizi yang lebih rendah.
2. Rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019 – 2024. Hal tersebut disebabkan karena informasi dan pengetahuan yang berasal dari pendidikan formal tidak secara langsung dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya, melainkan dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi serta pola kebiasaan hidup sehari-hari berdasarkan lokasi wilayahnya.
3. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial berpengaruh positif terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019 – 2024. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya bantuan sosial dari pemerintah yang disalurkan dengan cepat tanpa penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga

menimbulkan penyaluran yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan dana hingga ketergantungan terhadap bantuan sosial.

4. Harga Pangan tidak berpengaruh signifikan terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019 – 2024. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Jawa Timur tidak bergantung pada harga beras di pasaran dalam memenuhi kebutuhannya, karena mereka cenderung mengonsumsi beras dari hasil produksinya sendiri.
5. Tingkat pengangguran terbuka dan keluarga penerima manfaat bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan secara signifikan.

## **B. Implikasi**

1. Tingkat pengangguran terbuka mampu meningkatkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan peran dari pemerintah untuk menurunkan angka TPT hingga mencapai target yang seharusnya, seperti menggerakkan adanya investasi padat karya melalui pelatihan gratis untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal, serta mendorong intensifikasi pelaksanaan program *jobfair* inklusif dengan menyediakan ribuan lowongan dari banyak perusahaan. Selain itu, bagi lulusan SMK dan perguruan tinggi, terfasilitasi pembinaan langsung dari perusahaan melalui program praktik kerja

lapangan *link and match* antara SMK dengan industri serta program magang internship terstruktur dengan peluang rekrutmen.

2. KPMBansos terbukti dapat meningkatkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam penyebaran bantuan sosial, diperlukan perketatan verifikasi resmi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid dan terintegasi dengan data dukcapil, data jaminan sosial, dan data terkait lainnya. Selain itu, melakukan fokus bantuan terarah dengan memperbanyak bantuan non-tunai seperti paket dan *voucer* pangan maupun *e-wallet* dibandingkan bantuan tunai yang dapat disalahgunakan. Kemudian dilakukan perjanjian kontrak sosial baik dalam kesediaannya menggunakan bantuan untuk kebutuhan dasar serta kesediaan untuk mengikuti program pemberdayaan, sehingga tidak akan menimbulkan ketergantungan.

### C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan - keterbatasan penelitian yang dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan endogenitas, yaitu di antara variabel keluarga penerima manfaat bantuan sosial dengan variabel prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dapat terjadi hubungan dua arah. Pada penelitian ini, keluarga penerima manfaat bantuan sosial mampu menaikkan angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, namun

demikian, naiknya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan juga diduga mampu menaikkan angka keluarga penerima manfaat bantuan sosial.

